



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LEKOK
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 497951

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 5.675.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1000 m2/308 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 328.36 m2/110 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, WARISAN Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah Seluas 19600 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, WARISAN Rp. 500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 166 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, WARISAN Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 14500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, WARISAN Rp. 375.000.000
8. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, WARISAN Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 350.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 15.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 2.135.409.282**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.175.409.282

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.175.409.282

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.